

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hamel (2013) mengenai sistem pengendalian internal terhadap piutang pada PT Nusantara Surya Sakti, memperoleh hasil kurang efektif dengan kurangnya pemeriksaan saat audit internal, tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi untuk pembagian pembukuan dan bagian penerimaan kas, dan tidak adanya filosofis perusahaan yang dapat menuntun perusahaan dan karyawan lebih memahami arah tujuan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Richo (2015) mengenai sistem pengendalian internal atas piutang pada Developer Grand Kawanua International City, memperoleh hasil yang sudah berjalan dengan baik dengan manajemen sudah memiliki standar operasional prosedur yang sangat jelas dan terarah, selain itu manajemen juga ditunjang dengan karyawan yang berkompeten dimasing-masing bidangnya jadi tidak adanya kesalahan yang bersifat signifikan terutama pada pencatatan piutang. Selain itu bagian penagihan juga berjalan dengan lancar terbukti dari kecilnya bad debt manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhariani (2016) mengenai analisis sistem pengendalian internal atas piutang pada CV Varia Rasa Banjarmasin memperoleh hasil banyak mengalami kelemahan dengan terlihat dari unsur struktur organisasi, prosedur pencatatan, maupun penerapan praktik-praktik yang kurang sehat. Terjadinya rangkap tugas dan fungsi yang terjadi antara fungsi pencatatan dan fungsi penagihan, prosedur pencatatan piutang yang dibayar sebagian tidak diinformasikan yang sebenarnya tentang pelunasan pembayaran dan tidaknya adanya cadangan kerugian piutang.

B. Tinjauan Pustaka

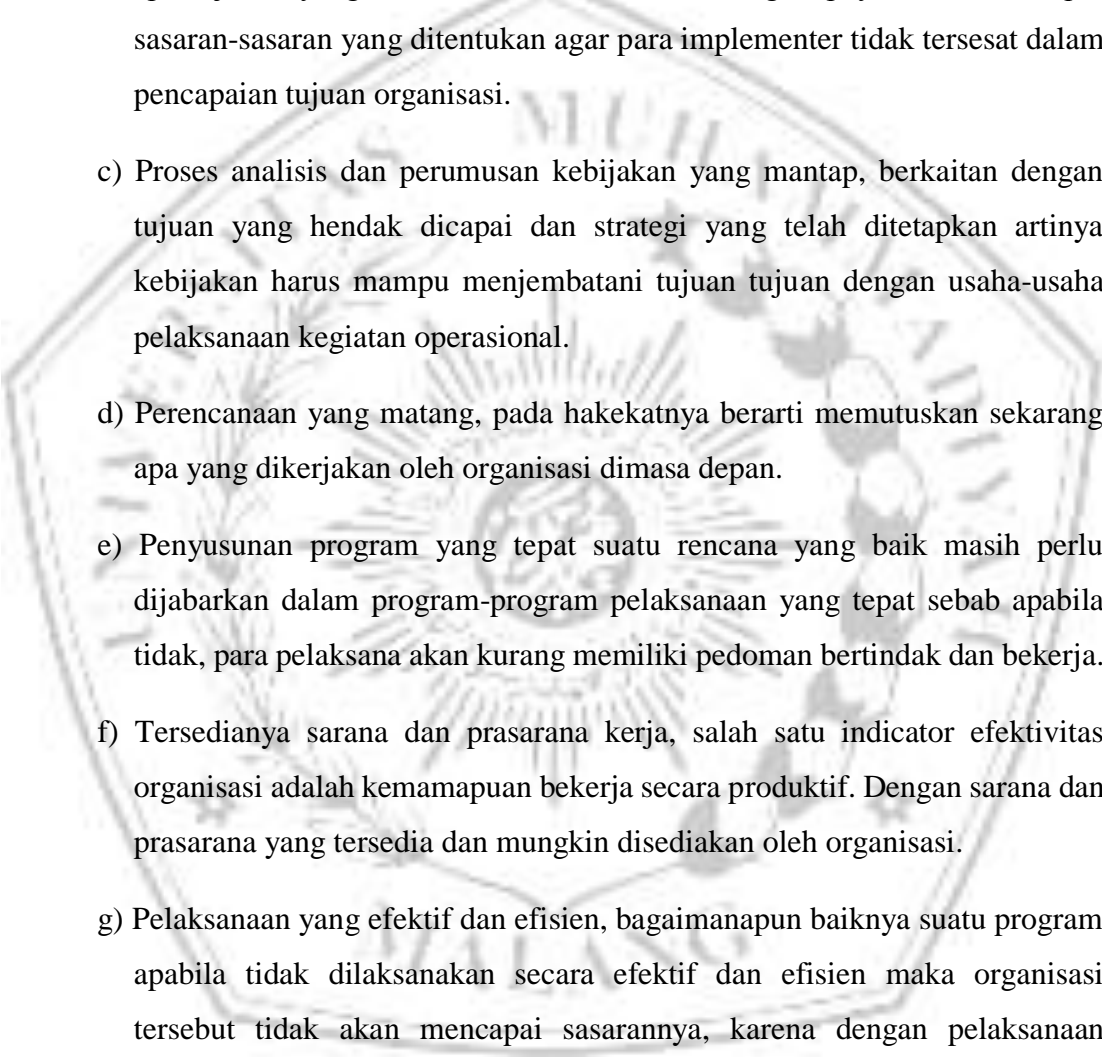
1. Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutu maka dapat dikatakan efektif.

Kurniawan (2005:109) “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian (2008:77), yaitu:

- 
- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
 - b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
 - c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
 - d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
 - e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
 - f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
 - g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
 - h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

3. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013:95) Teori *committee of sponsoring organization* (COSO), Internal control menurut COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff untuk membuat *reasonable assurance* mengenai :

1. Efektifitas dan efisiensi
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian internal yang dikemukakan COSO ada 5 komponen yang berpengaruh dan saling berkaitan tetapi akan difokuskan pada aktifitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan, informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang mungkin orang melaksanakan tanggungjawab mereka, dan pemantauan atau monitoring adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

5 komponen-komponen pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Enviroment*)

Merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal pada organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal didalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku

yang diharapkan. Manajemen mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi, parameter-parameter yang menjadikan dewan komisaris mampu melaksanakan tanggungjawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggungjawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan

2. Penilaian resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko terkait pencapaian tujuan. COSO merumuskan definisi resiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan akan berdampak merugikan bagi organisasi. Risiko yang dihadapi organisasi bersifat internal ataupun eksternal. Resiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkatan risiko yang telah ditetapkan. Penilaian resiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola, salah satu prakondisi bagi penilaian resiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkatan organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan dan kepatuhan yang jelas sehingga risiko-risiko terkait dapat diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilaian resiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian internal yang ada.

3. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang diterapkan manajemen melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan

dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas mencapai tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian yang bersifat preventif atau detektif dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contoh kegiatan pengendalian adalah otoritas dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi. Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Organisasi memerlukan informasi demi terselenggarakannya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal sebagaimana mestinya. Sementara itu, komunikasi merupakan proses berulang dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi didalam organisasi, baik dari atas kebawah maupun bawah ke atas.

5. Kegiatan pemantauan (*Monitoring Activities*)

Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama, sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantauan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktifitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing empat komponen pengendalian internal lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian internal ada dan berfungsi semestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik,

bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian resiko, efektifitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” (2011:319.2), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan menandai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan laporan keuangan, b. Efektifitas dan efisiensi operasional, c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Komponen-komponen dalam Pengendalian Internal, dalam SPAP (Standar Akuntan Publik), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait. (IAPI DPS, 2013:2) :

1. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggungjawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penaksiran risiko mencakup, perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau diperbaiki, teknologi baru, lini produk dan aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, standar akuntansi baru.
3. Aktivitas pengendalian berkaitan dengan: review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas.
4. Informasi dan komunikasi, auditor harus memperoleh pemahaman mengenai sistem informasi yang relevan dengan laporan keuangan dengan memahami: golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, bagaimana transaksi itu dimulai, catatan akuntansi, informasi akuntansi dan akun tertentu dalam laporan keuangan

5. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Dalam SPAP SA seksi 319, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (IAP1 2013:2)

4. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh James A. Hall yang dialih Bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2007:181) memiliki empat tujuan pengendalian internal adalah :

- a. Menjaga aktiva perusahaan.
- b. Memastikan akurasi dan keandalan pencacatan serta informasi akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan.
- d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Penjelasan dari empat poin tujuan pengendalian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menjaga aktiva perusahaan
Aktiva perusahaan dapat berupa aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Kekayaan perusahaan sangat diperlukan menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi aktiva tersebut hilang maka perusahaan mengalami kerugian besar sebab harta bagian penting selain modal yang membuat perusahaan tetap berdiri.
- b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.

Informasi menjadi dasar pembuatan keputusan yang diambil, baik oleh pihak manajemen maupun pihak lainnya. Benar atau tidaknya keputusan akan tergantung pada tingkat akurasi dari informasi akuntansi yang disediakan. Oleh karena itu perusahaan harus mengontrol dan memastikan pembuatan catatan-catatan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi, dimana catatan-catatan tersebut harus benar, tepat dan handal sebab dari catatan-catatan tersebut akan menjadi informasi akuntansi yang akan disampaikan kepada pihak manajemen.

c. Mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan.

Perusahaan harus mengendalikan jalannya operasional perusahaan untuk mendorong efisiensi kegiatan operasional perusahaan agar tidak terjadi, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Efisiensi adalah perbandingan antara besarnya pengeluaran dengan penghasilan yang didapatkan.

d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Secara berkala manajemen telah menentukan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila semua pihak dalam manajemen bekerjasama dengan baik dengan cara mematuhi kebijakan-kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.

Dari uraian diatas dapat diklasifikasikan bahwa tujuan pengendalian internal merupakan upaya perusahaan untuk menjaga kekayaanya dengan melakukan kegiatan pengawasan dan pengecekan disetiap unit tanggungjawab, keandalan sistem informasi akuntansi dan pencocokan data dengan rekonsiliasi. Dengan begitu perusahaan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen.

5. Piutang

Prinsip 5C yang selalu digunakan pemberian kredit dari bank kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit antara lain ;

a. Character

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

b. Capacity

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

c. Capital

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. Collateral

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan

yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. Condition

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.43 menyebutkan bahwa piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.

Menurut Smith (2005:286) piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Namun, tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa dia berhutang.

Klasifikasi piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu menurut sumber terjadinya, ialah piutang usaha dan piutang lain-lain. Sedangkan pengklasifikasian dapat dengan cara: (1) piutang terdiri dari piutang usaha (trade receivable) dan piutang non usaha (non trade receivable), (2) piutang terdiri dari piutang yang bersifat lancar jangka pendek dan piutang tidak lancar jangka panjang.

Dokumen Piutang, dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan kedalam kartu piutang adalah: (1) Faktur, dalam pencatatan piutang dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit.

(2) Bukti kas masuk, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang transaksi pelunasan dari debitur. (3) Memo kredit, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. (4) Bukti memorial, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan.

Catatan akuntansi, yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang, yaitu: (1) Jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit, (2) Jurnal retur penjualan, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan, (3) Jurnal umum, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. (4) Jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur, (5) Kartu piutang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur

Pengertian Piutang Tak Tertagih, yaitu klaim kepada pihak tertentu atas uang, barang atau jasa yang tidak tertagih atau kerugian yang ditimbulkan atas penjualan secara kredit. Piutang tak tertagih adalah piutang pelanggan kepada perusahaan yang belum bisa ditagih, diantara lain karena pelanggan menghilangkan diri atau memang tidak mampu membayar.

6. Pengendalian Internal Piutang

Penyelenggaraan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan mayoritas sudah sepenuhnya layak tetapi masih ada yang kurang efektif. Misalnya difungsi penagihan sangat jarang atau tidak melakukan sama sekali konfirmasi piutang kepada pelanggan untuk mengecek kebenaran jumlah piutang pelanggan, sehingga pada saat jatuh tempo ketika konfirmasi untuk pembayaran, tidak jarang terdapat kesalahan dalam jumlah piutang. Tetapi untuk pengamanan sudah sepenuhnya layak karena fungsi penagihan dan yang melakukan penyetoran dana ke bank.

Tahumang (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal piutang perusahaan PT Toyota sudah mampu menerapkan sistem pengendalian internal dengan

baik walaupun terdapat beberapa penyesuaian dalam penerapan sistem tersebut secara langsung.

Pengendalian internal atas piutang dimulai dari penerimaan order, kemudian persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas dan bank. Dalam hal ini diperhatikan retur penjualan secara periodik harus dibuat perincian piutang menurut golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan perusahaan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkaso telah bekerja dengan efisien.

Adapun sistem pengendalian internal atas piutang secara keseluruhan antara lain sebagai berikut:

1. Memisahkan fungsi pegawai dan bagian yang menangani transaksi penjualan (operasi) dan fungsi akuntansi untuk piutang.
2. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil piutang.
3. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang, harus dapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang
5. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya.